

36 Pegawai KPK Bidang Penindakan dan Eksekusi Terpapar Covid-19

JAKARTA (IM) - Sebanyak 36 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kedepuitan Bidang Penindakan dan Eksekusi terpapar Covid-19. Informasi itu disampaikan oleh Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri, Rabu (23/6).

"Pada Kedepuitan Bidang Penindakan dan Eksekusi sampai hari ini sejumlah 36 pegawai yang terpapar positif Covid-19," kata Ali dalam keterangan tertulis, Rabu (23/6).

Sebagai langkah tanggap situasi penyebaran Covid-19, KPK melakukan pembatasan kerja di kantor untuk sementara waktu pada 23 sampai dengan 25 Juni 2021 khusus-

nya pada unit Penindakan dan Eksekusi.

"Namun demikian, khusus kegiatan yang sebelumnya telah terjadwal tetap dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat," ucap Ali.

Selain itu, KPK juga melakukan swab test antigen bagi seluruh pegawai dan pihak-pihak terkait di lingkungan KPK serta melakukan penyemprotan disinfektan pada setiap ruang kerja pegawai. "Dengan upaya ini diharapkan seluruh kegiatan pada Kedepuitan Bidang Penindakan dan Eksekusi dan unit-unit kerja lainnya dapat segera kembali normal," tutur Ali. ● han

Sejumlah Pejabat Bandung Barat Diperiksa Penyidik KPK

JAKARTA (IM) - Sejumlah pejabat Pemkab Bandung Barat diperiksa KPK terkait dugaan Korupsi Bansos Covid-19, Rabu (23/6).

Setidaknya ada 12 pejabat yang akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana Pandemi Covid-19 pada Dinsos Pemkab Kabupaten Bandung Barat, tahun 2020.

Adapun, 12 pejabat pada Pemkab Bandung Barat itu yakni, Heru Budi Purnomo (Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan); Ida Nurhamidah, (Mantan Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan); Hendra Trismayadi (Kadis Dukcapil); H. Wahyudiguna (mantan Kadis Dukcapil); Ade Sudiana (Kadis UMKM).

Kemudian, Imam Santoso Mulyo; Asep Dendih (Kadis Pendidikan); Dewi Muniarti (Kabid Kesehatan Masyarakat); Mulyana, SKM, MM; dr. Wisnu Pramulyo Ady; Tuti Heriyati, SKM, MM; serta David Oor, SE, M.Si. Belum diketahui apa saja yang dilakukan penyidik terhadap para

saksi tersebut. Sebelumnya, KPK resmi menetapkan mantan Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna (AUS) dan anaknya, Andri Wibawa (AW) selaku pihak swasta sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengadaan paket bahan pangan (sembako) untuk penanganan pandemi Covid-19.

Tak hanya anak dan ayah tersebut, KPK juga menetapkan pemilih PT Jagat Dir Gantara (PT JDG) dan CV Sentral Sayuran Garden City Lembang (SSGCL) M Totoh Gunawan (MTG) sebagai tersangka dalam kasus ini. Para tersangka tersebut diduga total menerima keuntungan Rp5,7 miliar dari korupsi tersebut.

Dalam perkara ini, Aa Umbara Sutisna diduga menerima uang sebesar Rp1 miliar terkait pengadaan paket bahan pangan sembako untuk penanganan Covid-19 di Bandung Barat. Sedangkan Andri Wibawa, diduga menerima keuntungan sebesar Rp2,7 miliar. Sementara M Totoh Gunawan diduga menerima Rp2 miliar. ● mei

IDN/ANTARA



LATIHAN TERBANG JELAJAH

Pilot pesawat Super Tucano tiba di Lanud I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali, Rabu (23/6). Pesawat tempur taktis dari Skadron Udara 21 Lanud Abdurachman Saleh Malang tersebut menjalani latihan Terbang Jelajah ke wilayah Bali untuk meningkatkan kemampuan penerbang.

17 Kapal Barang Bukti Sitaan Kasus Korupsi ASABRI Dilelang

JAKARTA (IM) - Kejaksan Agung (Kejagung) melelang 17 kapal, yang merupakan barang bukti kasus dugaan korupsi PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI).

Kapuspenkum Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak menjelaskan, kapal yang dilelang merupakan barang sitaan yang diperoleh dari tersangka Heru Hidayat.

"Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-01/F.2/Fd.2/01/2021 tanggal 14 Januari 2021 Jo Nomor : Print-08/F.2/Fd.2/02/2021 tanggal 01 Februari 2021, akan dilakukan pelelangan atas benda sitaan atau barang bukti dalam perkara tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengingat biaya penyimpanan dan pemeliharaan yang tinggi, melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Neg-

ara dan Lelang (KPKNL) Samarinda," kata Leonard dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu (23/6).

Dari 17 lelang tersebut terdiri dari kapal jenis barge dan tug boat. Kisaran harganya pun beragam. Untuk yang paling murah mulai dari Rp1,7 miliar dan termahal Rp8,3 miliar.

Adapun kapal-kapal tersebut saat ini seluruhnya berada di Provinsi Kalimantan Timur. Ada yang di tepi Sungai Mahakam dan Pelabuhan Klas II, Sendawar, Kutai Barat.

Leonard menambahkan, lelang itu bakal dilakukan pada 2 Juli 2021, di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Samarinda Jalan Juanda 6, Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda.

"Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui surat elektronik e-Auction mengingat biaya penyimpanan dan pemeliharaan yang tinggi, melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Neg-

Polhukam

IDN/ANTARA



APEL GELAR PASUKAN

ARMADA JAYA XXXIX TA 2021

Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono (kanan) didampingi Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayjen TNI Suhartono (kedua kanan) menginspeksi pasukan saat Apel Gelar Pasukan Armada Jaya XXXIX TA. 2021 di Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (23/6). Armada Jaya XXXIX TA.2021 melibatkan sejumlah unsur kekuatan kapal perang dan prajurit tempur TNI Angkatan Laut akan berlangsung pada 28 Juni hingga 7 Juli 2021 di Dabo Singkep, Kepulauan Riau.

Wacana Jokowi 3 Periode Dinilai Didesain untuk *Test the Water*

Gerakan yang menyerukan jabatan presiden tiga periode diduga bikin pihak-pihak yang akan kehilangan kuasa saat jabatan Presiden Joko Widodo berakhir pada 2024.

JAKARTA (IM) - Wacana presiden tiga periode dinilai sengaja didesain untuk test the water atau melihat respons masyarakat. Direktur Eksekutif Indopolling Network, Wempy Hadir, mengatakan ada pihak yang secara sengaja membangun gerakan ini.

"Saya melihat ada kelompok-kelompok yang mencoba mendesain gerakan ini secara sadar dan kemudian mencoba testing on the water, mereka mencoba melihat reaksi publik atas gerakan tersebut," terang Wempy dalam diskusi virtual yang dilakukan oleh Para Syndicate, Rabu (23/6).

Wempy menjelaskan dugaan itu bukan tanpa ala-

"Kalau bicara soal teori sebab akibat, orang yang akan hilang kekuasaan ekonomi, politik, dan sosial akibat selesainya jabatan Jokowi di 2024, saya kira orang-orang ini bertanggung jawab pada gerakan-gerakan politik hari ini," katanya.

Wempy juga menggaris-bawahi sikap para partai politik terutama yang berada di dalam lingkaran kekuasaan pemerintah. Menurut dia, saat ini parpol memiliki kecenderungan untuk tidak menyatakan sikap secara jernih dalam menghadapi wacana penambahan jabatan Presiden tiga periode.

"Misalnya Nasdem, bahkan Pak Surya Paloh tidak memberikan statemen yang tegas, yang menyatakan menolak terjadinya jabatan Presiden tiga periode," tegasnya.

Wempy menyebut sikap parpol ini karena kekuatan politik Jokowi sangat kuat di koalisi pemerintahan saat ini.

"Ini menunjukkan bahwa memang Jokowi punya power

politik, kita tahu bahwa hari ini Jokowi punya kekuatan politik 74,2 persen di koalisi pemerintahan," ujarnya.

Menurutnya, posisi Jokowi ini menyebabkan segala hal bisa saja terjadi, termasuk perubahan UUD 1945 tentang masa jabatan presiden.

"Perubahan itu sangat mungkin terjadi, karena kekuatan politik yang sangat mawadahi, permasalahannya adalah Jokowi mau atau tidak," katanya.

Pada Jumat (18/6) pekan lalu, di Yogyakarta muncul kelompok relawan bernama Jokowi-Prabowo atau Jokowi-2024, Mereka mendelarasikan dukungan untuk Jokowi dan Prabowo Subianto berpasangan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Sekretaris Jenderal Jokowi-2024 Timothy Ivan triyono mengatakan, kelompok itu

terbentuk untuk mencegah polarianisasi ekstrim di Indonesia pasca pilres sebelumnya. Sementara itu, pada Senin (21/6) sejumlah masyarakat di Kupang, NTT, mendeklarasikan diri mendukung referendum masa jabatan presiden. Deklarasi itu mendukung Jokowi untuk maju kembali dalam kontestasi Pilpres 2024, agar bisa menjabat selama tiga periode.

Ketua Komisi Referendum, Pius Rengka mengatakan pihaknya mendukung Jokowi untuk kembali menjadi Presiden karena dianggap dapat menjawab kepentingan sebagian masyarakat Indonesia, terutama dari kalangan menengah ke bawah.

"Karena itu Presiden Jokowi diharapkan melanjutkan untuk satu periode lagi, agar persoalan rakyat dapat secara dituntaskan," katanya. ● han

KPK Setor Rp550 Juta Hasil Lelang Range Rover Milik Markus Nari ke Negara

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyertorkan uang Rp550 juta ke kas negara hasil lelang barang rampasan berupa mobil merek Land Rover dengan jenis Range Rover, milik terpidana Markus Nari, Rabu (23/6).

"Jaksa eksekutor KPK Andry Prihandono telah melakukan penyeteroran ke kas negara uang hasil lelang barang rampasan sejumlah Rp550 juta yang berasal dari lelang satu unit kendaraan roda empat merek Land Rover Type Range Rover 5.0L 4x4 warna hitam," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Rabu (23/6).

Penyeteroran Rp550 juta ke kas negara tersebut sesuai dengan perintah putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor: 1998 K/Pid.Sus./2020 tanggal 13 Juli 2020 atasnama Markus Nari. Di mana, putusan di tingkat kasasi menjatuhkan hukuman delapan tahun penjara dan denda Rp300 juta subsidair delapan bulan kurungan terhadap Markus Nari.

Tak hanya itu, MA juga menjatuhkan pidana tambahan berupa kewajiban Markus Nari

untuk membayar uang pengganti sebesar 900.000 dollar AS. Jika uang pengganti itu tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana penjara selama tiga tahun.

Sebelumnya, KPK melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang I berhasil melelang satu unit mobil Range Rover 5.0L 4x4 warna hitam. Mobil rampasan itu adalah milik terpidana perkara korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP), Markus Nari.

Markus Nari terbukti menerima 400 ribu dollar AS dari Andi Narogong selaku koordinator pengumpul fee proyek KTP elektronik terkait proyek e-KTP. Dia juga terbukti menerima 500 ribu dollar AS dari keponakan Setya Navanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo.

Selain itu, Markus Nari juga terbukti menghalang-halangi penyidikan kasus korupsi mantan Anggota DPR, Miryam S Haryani dan pemeriksaan di sidang pengadilan untuk terdakwa Irman dan Sugiharto dalam perkara korupsi KTP elektronik. ● mei

Pangkostrad Dudung Abdurachman Resmi Menyandang Bintang Tiga

JAKARTA (IM) - Sebanyak 30 Perwira Tinggi (Pati) TNI menerima kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari pangkat semula. Naikan pangkat ini berdasarkan Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/1397/VI/2021 tertanggal 22 Juni 2021.

"Panglima TNI Marsdal TNI Hadi Tjahjanto menerima 17 Pati TNI terdiri dari 17 Pati TNI AD, 4 Pati TNI AL dan 9 Pati TNI AU, bertempat di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur," ujar Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Laut (KH) Edys Riyanto dalam keterangan tertulis, Rabu (23/6).

Dari 30 Pati yang menerima kenaikan pangkat, salah satunya adalah Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad). Pangkat Dudung semula Mayor Jenderal dan kini menyandang Letnan Jenderal atau bintang tiga.

Adapun 30 Pati TNI yang menerima kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi sebagai berikut:

1. Pangkostrad, Letjen TNI Dudung Abdurachman.
2. Danpusterad, Letjen TNI Teguh Arief Indratmoko.
3. Pa Sahli Tk III Bidang Jaspers Panglima TNI, Mayjen TNI Benny Antony Sitohang.
4. Pa Sahli Tk III Kساد Bidang Wassus dan LH, Mayjen TNI Gregorius Henu Basworo.
5. Pa Sahli Tk III Bidang Sosbudkum HAM dan Narkoba Panglima TNI, Mayjen TNI Budi Pramono.
6. Pa Sahli Tk II Kasad Bidang Wassus, Brigjen TNI Endi Servandy.
7. Kabinda Kalimantan Timur pada Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri BIN, Brigjen TNI Danni Koswara.
8. Pa Sahli Tk II Wassus Sahli Bidang Wassus dan LH Panglima TNI, Brigjen TNI Agustinus.
9. Kapoksahli Pangdam XII/Trpr, Brigjen TNI Handoko Nurseta.
10. Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat dan Objek Vital Nasional, Kemko Polhukam, Brigjen TNI M Sujono.
11. Asops Kaskogabwilhan III, Brigjen TNI Aditya Nindra Pasha.
12. Widyaiswara Bidang Strategi dan Kawasan Seskoad, Brigjen TNI Halomoan F S Alexandra.
13. Dircab Pusziad, Brigjen TNI Mochamad Reza Utama.
14. Dirbang Riset RSPAD Gatot Soebroto, Brigjen TNI Sutan Finekri A Abidin.
15. Dirrenbangan Ditjen Renhan Kemhan, Brigjen TNI Kuswara Harja.
16. Kapuslemasml Babinkum TNI, Brigjen TNI Salidin.
17. Dansatidik Puspomad, Brigjen TNI Kemas Ahmad Yani Yulianto.

4. Pati TNI AL:
1. Irjenal, Laksda TNI Sunaryo.
2. Koorsahli KSAL, Laksda TNI Mohamad Zaenal.
3. Seklem AAL, Laksma TNI Syamsul Rizal.
4. Danlantamal I Blw Koarmada I, Laksma TNI Ahmad Wibisono.
9. Pati TNI AU:
1. Dansesko TNI, Marsda TNI Diah Yudanardi.
2. Danjen Akademi TNI, Marsda TNI Andyawan Martono.
3. Aspers KSAU, Marsda TNI Elianto Susetio.
4. Wairien TNI, Marsda TNI Hesly Paat.
5. Pati Sahli KSAU Bidang Kersalem, Marsma TNI I Putu Gede Suartika.
6. Pa Sahli Tk II Intekmil Sahli Bidang Intekmil dan Siber Panglima TNI, Marsma TNI V Andy P Suartha.
7. Pati Sahli Kasau Bidang Sumdana, Marsma TNI Julianto Sutrisnawan.
8. Askomlek Kas Kogabwilhan III, Marsma TNI Khat Sitanggang.
9. Dirkes Ditjen Kuathan Kemhan, Marsma TNI Budi S Utomo. ● han

PENGUMUMAN

Guna memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Direksi PT. CITRAKENCANA HOTELINDO, berkedudukan di Kabupaten Karawang ("Perseroan") dengan ini mengumumkan bahwa :

- PAI, YU-WEN akan mengambil alih saham sebanyak 1.340 saham dan MELAWATY akan mengambil alih saham sebanyak 560 saham milik Tuan Insinyur SOEGIHARJO WIDJAJA dalam Perseroan.

- MELAWATY akan mengambil alih saham sebanyak 100 saham milik Nona CINDY OLIVIA WIDJAJA dalam Perseroan.

Pengambilan 2.000 saham dalam Perseroan secara langsung dari para pemegang saham Perseroan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) UUPT juncto Pasal 127 (8) UUPT.

Semua kreditor Perseroan dan pihak terkait yang berkeberatan dapat mengajukan keberatan secara tertulis dengan disertai alasan dan bukti-bukti pendukung yang sah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pengumuman ini disampaikan kepada Direksi PT. CITRAKENCANA HOTELINDO, di Dusun Badami RT. 006, RW. 002, Margakaya - Teluk Jembe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

24 Juni 2021

PT. CITRAKENCANA HOTELINDO

Direksi

PENGUMUMAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan (8) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") bersama ini diumumkan bahwa ARWIN A WULUR dan/atau afiliasinya dan/atau pihak lain yang ditunjuk berencana untuk melakukan pengambilalihan sebagian besar saham pada PT MORABO ENERGI UTAMA, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan ("Perseroan") dari pemegang saham mayoritas Perseroan.

Pengambilalihan saham-saham sebagai mana dimaksud dalam pengumuman ini merupakan pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (7) UUPT. Sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (4) UUPT, bagi kreditor yang memiliki keberatan terkait dengan rencana pengambilalihan Perseroan sebagaimana disebut di atas, dapat mengajukan keberatan kepada Direksi Perseroan secara tertulis, disertai surat-surat pendukungnya dalam jangka waktu paling lambat 14 hari setelah tanggal pengumuman ini.

24 Juni 2021
Hormat kami

Arwin A Wulur Direksi
PT Marabo Energi
Utama

PENGUMUMAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan (8) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") bersama ini diumumkan bahwa ARWIN A WULUR dan/atau afiliasinya dan/atau pihak lain yang ditunjuk berencana untuk melakukan pengambilalihan sebagian besar saham pada PT MORENDRA BANGUN ELEKTRIKA, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan ("Perseroan") dari pemegang saham mayoritas Perseroan.

Pengambilalihan saham-saham sebagai mana dimaksud dalam pengumuman ini merupakan pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (7) UUPT. Sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (4) UUPT, bagi kreditor yang memiliki keberatan terkait dengan rencana pengambilalihan Perseroan sebagaimana disebut di atas, dapat mengajukan keberatan kepada Direksi Perseroan secara tertulis, disertai surat-surat pendukungnya dalam jangka waktu paling lambat 14 hari setelah tanggal pengumuman ini.

24 Juni 2021
Hormat kami

Arwin A Wulur Direksi
PT Morendra Bangun
Elektrika

PENGUMUMAN

Bahwa terkait dengan akan dilakukan pemisahan harta setelah perkawinan antara TIMOTHEUS dan BONG HENY SILLIA CHEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang akan berlaku juga terhadap pihak ketiga setelah disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, maka kami umumkan apabila terdapat keberatan, harap disampaikan secara tertulis ke :

Cempaka Putih Indah Nomor 27, RT 010, RW 007, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, selambat-lambatnya 30 hari sejak Pengumuman ini.

PENGUMUMAN

Bahwa akan dilakukan pengambilalihan hak lebih dari 50% (lima puluh persen) saham dalam PT. MAXIMA INVESTINDO UTAMA, berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan").

Keberatan disampaikan secara tertulis ke alamat di Parin Tower Senayan City Lantai 23, Jalan Asia Afrika Lot 19, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dengan tembusan kepada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perseroan sebagaimana disebut di atas, selambat-lambatnya 14 hari sejak pengumuman ini.

Pengumuman ini dibuat guna memenuhi ketentuan pasal 127 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

24 Juni 2021
Direksi Perseroan

Catatan :
- rancangan pengambilalihan dapat diperoleh pada alamat Perseroan tersebut di atas.

PENGUMUMAN RENCANA PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF ("KIK") DAN PROSPEKTUS REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND

PT Syaileandra Capital, berkedudukan di Jakarta, selaku Manajer Investasi dari REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND dengan ini bermaksud menyampaikan rencana perubahan KIK dan Prospektus REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND sehubungan dengan perubahan ketentuan imbalan jasa Manajer Investasi yang semula "maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per tahun" menjadi "maksimum sebesar 5% (lima persen) per tahun".

Rincian perubahan ketentuan dalam KIK dan Prospektus tersebut di atas dapat diperoleh di Manajer Investasi.

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada para Pemegang Unit Penyetoran REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND serta pihak-pihak yang berkepentingan.

SYAILENDRA Jakarta, 24 Juni 2021
Manajer Investasi
PT Syaileandra Capital
terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan